



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM NOMOR 34 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENGUSAHAAN/INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM




#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan disepakatinya pemutusan dan pengakhiran kontrak kerjasama Pengusahaan / Investasi Pengelolaan Sampah di Kota Batam antara Pemerintah Kota Batam, PT. Surya Sejahtera dan PT. Surya Sejahtera Envirotech (SSET), sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 22 Oktober 2010, maka perlu dilakukan antisipasi terhadap kelangsungan pelaksanaan pelayanan sampah dan pemungutan retribusi Kebersihan oleh Pemerintah Kota Batam ;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas, selanjutnya perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pengusahaan/Investasi Pengelolaan Sampah Di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASS	
KA	✓
KAP	✓

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);
12. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASS.	
KA.	
KABAG	

13. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Kelangsungan Kerjasama Pengusahaan / Investasi Pengelolaan Sampah di Kota Batam Tanggal 22 Oktober 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KERJASAMA PENGUSAHAAN/INVESTASI PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA BATAM**

**Pasal 1**

Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Pengusahaan/Investasi Pengelolaan Sampah Di Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2009 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

- (1) Bahwa Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berakibat kepada penyelenggaraan pelayanan sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan diberlakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam.
- (2) Bahwa Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sekaligus juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Nomor 172/HK/III/2009 tentang Penetapan Tarif Jasa Pelayanan Sampah di Pulau Batam.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASS	
KA	u
KEB	A

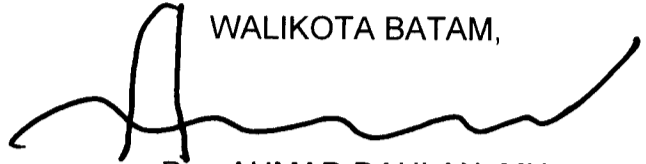
Pasal 3

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Desember 2010

WALIKOTA BATAM,



Drs. AHMAD DAHLAN, MH



Diundangkan di Kota Batam  
Pada tanggal 10 Desember 2010

Sekretaris Daerah,



AGUSSAHIMAN, SH  
Pembina Utama Madya,  
Nip. 19601123 198503 1 009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2010 NOMOR 137

PARAF KOORDINASI	
SEKDA:	
ASS. _____	
KA _____	
KABAS. _____	